



PEMERINTAH ACEH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2026

**BIRO ORGANISASI
SETDA ACEH**



GUBERNUR ACEH

Nomor : 000.8.6.3/5131
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Dokumen
Perjanjian Kinerja Pemerintah
Aceh Tahun 2026.

Banda Aceh, 30 April 2026
12 Dzulqaidah 1447
Yang Terhormat,
Presiden Republik Indonesia
u.p. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia

di-

J a k a r t a

1. Memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, terlampir kami sampaikan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2026 yang merupakan salah satu dokumen dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).
2. Demikian kami sampaikan, terima kasih.



GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia



GUBERNUR ACEH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH ACEH

TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUZAKIR MANAF**

Jabatan : **GUBERNUR ACEH**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Banda Aceh, 30 April 2026

GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2026**

No	Tujuan	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Aqidah, Syariah, dan Akhlak	1.1	Meningkatnya pelaksanaan Syariat Islam	Persentase dayah yang mandiri	47,19%
		1.2	Meningkatnya penyaluran terhadap pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah	Indeks Zakat Nasional Aceh	0,65
2	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan muamalah	2.1	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan Syariat Islam serta kemakmuran mesjid	Indeks kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan syariat islam	84%
3	Meningkatkan pengawasan kehidupan keagamaan	3.1	Meningkatnya pembinaan akhlak dan kerukunan antar dan sesama ummat	Persentase dimensi toleransi	65,09%
		3.2	Meningkatnya upaya pencegahan potensi konflik	Persentase potensi konflik yang tertangani	100%
4	Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh	4.1	Terakomodirnya butir- butir MoU Helsinki dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Indeks Reintegrasi Aceh	0,14
		4.2	Menguatnya pemberdayaan Lembaga Wali Nangroe	Persentase pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga Wali Nangroe	90%
		4.3	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban	Indek Pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	53,75
				Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban	95%
				Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	62,26%
		4.4	Terwujudnya pelaksanaan kebudayaan dan adat istiadat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,11 - 57,15
		4.5	Terwujudnya pelaksanaan keistimewaan dibidang pendidikan	Persentase penerapan kurikulum pendidikan islami dan ke-Aceh-an di kabupaten/kota	34,78%
		4.6	Terwujudnya peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah	Persentase fatwa dan tausiyah yang telah ditetapkan untuk diterapkan	24,34%

5	Mewujudkan kemandirian ekonomi	5.1	Terwujudnya peningkatan produksi hilirisasi pangan utama	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	119,74
		5.2	Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Indeks Inovasi Daerah	58,5
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,87 %
				Peringkat Inovasi Daerah	12,6
				Presentase Dana untuk Inovasi dari APBA	0,56%
		5.3	Terwujudnya industrialisasi sektor unggulan	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	13,1 Ribu Orang
				Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	0,41%
				Proporsi UMKM terhadap jumlah angkatan kerja (%) (sebagai proxy proporsi PDRB ekonomi kreatif)	16,48 %
				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	4,93%
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,9 %
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,8 %
6	Meningkatkan stabilitas ekonomi makro	6.1	Meningkatnya penerimaan Aceh	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,14 %
		6.2	Terbukanya jaringan pasar domestik dan global	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	64,78-65,44 %
				Indeks Harga Konsumen	110 %
		6.3	Meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi berstatus mandiri	Persentase kawasan transmigrasi berstatus mandiri	14,28 %
		6.4	Terwujudnya perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Persentase Desa Mandiri	0,95 %
		6.5	Pendalaman/intermediasi sektor keuangan	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,48 %
				Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	1.996.602
				Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,1 %
				Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	19,87 %
				Total Kredit/PDRB (%)	19,09 %
7	Menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal	7.1	Meningkatnya pemanfaatan lahan-lahan terlantar dan HGU	Persentase pemanfaatan lahan terlantar	15,64 %

		7.2	Terwujudnya lumbung pangan Aceh	Indeks Ketahanan Pangan	76,34
				Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%))	7,99 %
		7.3	Meningkatnya pembangunan infrastruktur investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,77 - 33,10 %
		7.4	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja Sektor Formal dan Informal	Persentase lapangan kerja Menurut Status Formal dan Informal	43,9 : 56,1 %
8	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, perumahan dan pulau terluar			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	44,38 %
		8.1	Meningkatnya ketahanan air daerah	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	34,82%
				Indeks Ketahanan Air Daerah	3,61
		8.2	Meningkatnya penyediaan dan penataan perumahan dan pemukiman yang layak huni	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	70,47%
		8.3	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	5,7%
		8.4	Tersedianya jaringan listrik yang terkoneksi dan mandiri sampai ke pulau terluar	Konsumsi Listrik per Kapita	714,5 kWh
9	Meningkatkan kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang	8.5	Meningkatnya koneksitas wilayah dan pulau terluar untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang	Rasio Konektivitas	0,7
		9.1	Meningkatnya kinerja perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase kepatuhan pembangunan terhadap rencana tata ruang	72%
		9.2	Tersedianya jaringan teknologi informatika yang terkoneksi	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,8
10.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	10.1	Meningkatnya akses pendidikan	Harapan Lama Sekolah	14,77 - 14,78 Tahun
		10.2	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Kualitas Pendidikan (SPM)	73,17%
				Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	9,75 – 14.00 %
				Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	1,00 - 3,50 %
				Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	59,24%

				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	31,35- 33,50 %
				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	28,00 - 29,8 %
				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,66%
				Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,37 - 10,39 Tahun
		10.3	Meningkatnya minat baca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca	72
11.	Menguatkan kesetaraan gender, hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas	10.4	Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup (UHH)	70,84 Tahun
		11.1	Meningkatnya keluarga berkualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan, anak, dan kesejahteraan disabilitas	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,438
				Indeks Pembangunan Gender	93,05
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67,6
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,34
				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24,06%
		11.2	Meningkatnya sistem kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	0,572
12	Peningkatan prestasi olah raga serta kepemudaan	12.1	Meningkatnya kualitas olahraga dan kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	64
13.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintah Aceh	13.1	Terwujudnya tata kelola Pemerintah Aceh yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government)	Indeks Pelayanan Publik	4,5
				Nilai SAKIP	68
				Opini BPK	WTP
		13.2	Tersedianya database perencanaan dan penganggaran serta pengawasan yang valid, akurat, dan terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	94
		13.3	Terwujudnya kompetensi sumberdaya aparatur Pemerintah Aceh yang berintegritas dan melayani	Indeks Profesionalisme ASN	84,55
		13.4	Terwujudnya sistem digitalisasi dalam pelayanan publik	Indeks Transformasi Digital	50,73

		13.5	Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi APIP dalam pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Integritas Nasional	71,1
				Maturitas SPIP terintegrasi	Level 3
		13.6	Terwujudnya kepatuhan hukum dalam melayani publik	Indeks Reformasi Hukum	71
14.	Meningkatkan stabilitas politik	14.1	Terwujudnya partisipasi politik secara demokratis	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	76
15.	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan yang lestari	15.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,06
				Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	18,75%
		15.2	Meningkatnya kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,596
		15.3	Terwujudnya pengelolaan sumber energi baru dan terbarukan	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	106,62 SBM/Rp milyar
				Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	12,07%
16.	Meningkatkan resiliensi terhadap bencana	16.1	Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,51

Program

Anggaran

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.385.208.682.048,97
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	946.100.178.376,00
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	76.920.000,00
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	18.007.285,00
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	359.094.226.999,00
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	286.343.251,00
7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	232.010.077.929
8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11.462.182.920,00
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	170.767.200,00
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	270.668.003.867,00
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	79.763.359,00
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	507.340.000,00
13	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	247.294.988.238,00
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.605.440.000,00
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	146.115.422.302,00
16	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	24.416.735.135,00
17	PROGRAM PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	81.859.400.000,00
18	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	358.370.513.720,00
19	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.448.926.390,00
20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	11.737.387.000,00

21	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.530.402.100,00
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.467.540.085,00
23	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	85.296.000,00
24	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	16.792.800.605,00
25	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	16.974.116.455,00
26	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100.379.926.992,00
27	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	53.719.915,00
28	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	322.999.864,00
29	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	331.665.400,00
30	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	72.575.000,00
31	PROGRAM PPERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100.000.000,00
32	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	7.600.000.000,00
33	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	76.624.800,00
34	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	334.223.378,00
35	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	498.391.530,00
36	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	54.894.020,00
37	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	933.888.354,00
38	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	130.864.550,00
38	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	123.805.096,00
39	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.600.000.000,00
40	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4.700.000.000,00
41	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	140.000.000,00
42	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	500.000.000,00
43	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	10.610.834,00
43	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	10.853.613,00
44	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	30.000.000,00
45	PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH	113.981.600,00
46	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	22.201.627,00
47	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	93.189.018,00
48	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	154.949.732,00
49	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	60.187.150,00
50	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	345.287.700,00
51	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.684.586.600,00
52	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	35.000.000,00
53	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	72.620.000,00
54	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	98.114.300,00
55	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	227.336.759,00
56	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	97.199.600,00

9.

57	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	93.538.450,00
58	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.531.600.500,00
59	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	19.579.384.800,00
60	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	17.802.295.645,00
61	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.211.803.900,00
62	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	988.996.000,00
63	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	658.001.300,00
64	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	113.844.430,00
65	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	225.763.450,00
66	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	48.952.180,00
67	PROGRAM PENATAAN DESA	31.187.302,00
68	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	75.000.000,00
69	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	818.812.698,00
70	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.999.293.782,00
71	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	67.374.083.756,00
72	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	9.136.471.510,00
73	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	484.800.000,00
74	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.871.424.832,00
75	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	13.921.129.765,00
76	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	210.561.000,00
77	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	174.176.000,00
78	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	400.000.000,00
79	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	400.000.000,00
80	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.340.000.000,00
81	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.848.563.041,00
82	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	72.541.830.417,00
83	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	9.120.367.500,00
84	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	124.679.000,00
85	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	807.189.000,00
86	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	615.588.800,00
87	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	100.933.000,00
88	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	105.152.000,00
89	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	6.461.968.566,00
90	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	64.080.000.000,00
91	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	3.000.000.000,00
92	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	499.483.800,00
93	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.570.000.000,00
94	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	850.000.000,00

95	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	544.554.604,00
96	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	6.851.000.000,00
97	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	4.346.000.000,00
98	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.885.401.233,00
99	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.909.430.673,00
100	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.000.000.000,00
101	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	82.000.000,00
102	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	7.314.143.269,00
103	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	890.446.585,00
104	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	30.409.000,00
105	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	63.943.200,00
106	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	6.596.644.000,00
107	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	66.702.800.000,00
108	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	100.838.529.000,00
109	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	190.000.000,00
110	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	103.646.776.050,00
111	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	103.824.774.110,00
112	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	67.953.297.321,19
113	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	425.000.000,00
114	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	6.640.592.000,00
115	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	15.497.263.491,00
116	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.140.785.224,00
117	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	164.455.306,00
118	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	2.172.606.742,00
119	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	97.856.482.000,00
120	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	979.740.000,00
121	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	141.183.840,00
122	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	101.998.000,00
123	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	23.291.533.000,00
124	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	83.832.160,00
125	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	474.731.977,00
126	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	121.745.000,00
127	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.055.804.000,00
128	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	25.000.000,00
129	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	21.000.000,00
130	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.112.493.192,00
131	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.545.408.362,00
132	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.040.152.725,75

133 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.135.349.513,00
134 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.889.937.350,00
135 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	10.836.773.001,00
136 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.889.455.857,00
137 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	99.029.797.181,00
138 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	11.291.481.692,33
139 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.458.502.320,00
140 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.362.962.442,00
141 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	301.533.290,00
142 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.770.835.262.617,92
143 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.154.251.318,00
144 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	13.632.310.913,00
145 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	673.613.998,00
146 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	47.788.441.350,59
147 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.347.905.000,00
148 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.477.828.000,00
149 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.441.094.000,00
150 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.540.705.103,00
151 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	29.812.265.000,00
152 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	135.026.000,00
153 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	316.313.000,00
154 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	466.160.812,00
155 PROGRAM REINTEGRASI ACEH	54.365.164.596,00
156 PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	60.889.462.791,00
157 PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	4.861.355.290,00
158 PROGRAM KEURUKON KATIBUL WALI/ SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH	18.863.338.566,00
159 PROGRAM BAITUL MAL ACEH	244.555.988.392,00



GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF

BIRO ORGANISASI
SETDA ACEH